

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN SISTEM
PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna
memperolehgelar sarjana

Oleh

**ZAIFAN AUZARIFA
NPM : 21100057
PRODI AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)
BANDA ACEH**

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari dalam mengikuti perkuliahan sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebahagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh.

Penulis menyadari sepenuhnya sebagai manusia yang lemah dan tidak luput dari kesalahan serta kekhilafan khususnya dalam penulisan skripsi ini yang mungkin disana-sini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka pada tempatnya Penulis mengharapkan masukan ataupun kritikan yang membangun dari para ilmuwan dan atau pihak lainnya atas skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan ilmu Akuntansi khusus tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada waktu yang akan datang.

Akhir kata Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Banta Karollah SE, M.S. M selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesikan studi di STIES Banda Aceh.
2. Ibu Intan Novia Astuti, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh

3. selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/Ibu dosen STIES Banda Aceh, yang tanpa pamrih dan sepenuh hati telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada kami selama mengikuti perkuliahan dan bimbingan skripsi ini.
6. Kedua orang Tua yang sangat dicintai yang selama ini telah memberikan dukungan, bantuan baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Disamping itu, juga kepada keluarga saya yang tercinta yang penuh kesabaran telah memberikan dukungan dan perhatian yang cukup besar dalam penyelesaian perkuliahan di STIES Banda Aceh.
7. Semua teman-teman tercinta yang secara aktif telah memberikan dukungan dan bantuan sehari-hari selama perkuliahan dan bimbingan skripsi di Kampus STIES Banda Aceh. Atas bantuan yang telah diberikan, semoga ALLAH S.W.T melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, *Amiin ya rabbal A'lamin.*

Banda Aceh, Januari 2023

Penulis

ZAIFAN AUZARIFA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
1.2 Masalah Penelitian.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Skop Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Akuntabilitas Kinerja.....	9
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja.....	9
2.1.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas	12
2.1.3 Komponenn Akuntabilitas	12
2.1.4 Indikator Akuntabilitas Kinerja	13
2.2 Perencanaan Anggaran.....	14
2.2.1 Pengertian Perencanaan Anggaran.....	14
2.2.2 Manfaat Anggaran.....	16
2.2.3 Indikator Perencanaan Anggaran.....	17
2.3 Sistem Pelaporan.....	18
2.3.1 Pengertian Sistem Pelaporan	18
2.3.2 Peranan dan Tujuan Pelaporan keuangan.....	19
2.3.3 Indikator Sistem Pelaporan.....	21
2.4 Penelitian Terdahulu	21
2.5 Kerangka Konseptual.....	22
2.6 Hipotesis Penelitian	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian.....	26
3.2 Metode Penarikan Sampel	28
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	29

3.4 Operasional Variabel	31
3.5 Metode Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil penelitian.....	39
4.1.1 Analisis Data Hasil Penelitian	39
4.1.2 Karakteristik Responden	39
4.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas	41
4.2.1 Pengujian Validitas	41
4.2.2 Pengujian Reliabilitas.....	43
4.3 Analisis Deskriptif	43
4.3.1 Persepsi Responden terhadap Perencanaan Anggaran (X1).....	44
4.3.2 Persepsi Responden terhadap system pelaporan (X2)	45
4.3.3 Persepsi Responden terhadap Akuntabilitas Kinerja (X3).....	47
4.4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik	48
4.4.1 Hasil Pengujian Normalitas	48
4.4.2 Hasil Pengujian Multikoliniearitas.....	49
4.4.3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.....	49
4.5 Hasil Uji Hipotesis.....	50
4.5.1 Hasil Pengujian Secara Simultan.....	50
4.5.2 Hasil Pengujian Secara Parsial	51
4.6 Koefisien Korelasi dan Determinasi	53
4.7 Pembahasan.....	53
4.7.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja.....	53
4.7.2 Pengaruh system Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PERPUSTAKAAN	59
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	21
Tabel III.1	Daftar Populasi	27
Tabel III.2	Skala Likert	30
Tabel III.3	Operasional Variabel.....	32
Tabel IV.1	Karakteristik Responden.....	40
Tabel IV.2	Hasil Uji Validitas	42
Tabel IV.3	Hasil Uji Reliabilitas.....	43
Tabel IV.4	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Perencanaan Anggaran (X1)	45
Tabel IV.5	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Sistem Pelaporan (X2)	46
Tabel IV.6	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Akuntabilitas Kinerja (Y).....	47
Tabel IV.7	Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	49
Tabel IV.8	Hasil Uji F (Simultan).....	51
Tabel IV.9	Hasil Uji T (Parsial).....	52
Tabel IV.10	Nilai Koefisien Determinasi.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual.....	24
Gambar IV 1 Normal Probability Plot	48
Ganbar IV.2 Grafik ScatterPlot	50

ABSTRAK

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Nama : ZAIFAN AUZARIFA
NPM 21100057
Pembimbing I :
Pembimbing II :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kota Banda Aceh. Permasalahan yang timbul adalah apakah perencanaan anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kota Banda Aceh? Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh perencanaan anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kota Banda Aceh baik secara simultan maupun secara parsial. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh kasubag keuangan dan bendahara yang bekerja di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang ada di kota Banda Aceh yang berjumlah 92 orang pegawai dengan menggunakan teknik *sensus*. Variabel perencanaan anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja diukur dengan menggunakan skala *Likert*, dan data diperoleh dengan menyebarluaskan kuesioner ke responden. Analisis data menggunakan analisis statistik model korelasi dan regresi berganda dengan bantuan *Software SPSS 25*. Untuk menguji setiap item pada setiap variabel telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrument.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh perencanaan anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil uji F diperoleh angka $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $(39,461 > 2,71)$ dan uji signifikan bahwa p value sebesar $0,000 < p$ yang ditetapkan sebesar 0,05 yang berarti signifikan. Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa : 1. Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja $T_{hitung} 7,370 > T_{tabel} 1,661$ dan p value $0,000 < p$ dari 0,05 berarti signifikan. 2. System pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja $T_{hitung} 2,524 > T_{tabel} 1,661$ dengan p value $0,013 < 0,05$ berarti signifikan. Dengan demikian pengaruh perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja lebih dominan kuat dari pada system pelaporan. Hasil nilai koefisien determinasi sebesar 47,0% menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (perencanaan anggaran dan sistem pelaporan) dalam menjelaskan variabel dependen (akuntabilitas kinerja) dan sisanya merupakan variable lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Kinerja akuntabilitas, perencanaan anggaran, sistem pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dan Permasalahan

Era pemerintahan saat ini, akuntabilitas sangat penting dalam pelaksanaan pemerintah daerah baik dalam kinerja maupun pelaporan keuangan. Akuntabilitas diyakini mampu merubah kondisi suatu pemerintah, dari kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan yang demokratis, Nurrizkiana (2017). Di Indonesia, pelaksanaan otonomi sudah dilakukan sejak tahun 2001. Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan keuangan saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Putra, 2017).

Dilingkungan pemerintahan, penyerahan kewenangan dari manajemen puncak kepada para manajer level lebih rendah dimaksudkan untuk mendekatkan tangan pemerintah kepada publiknya. Dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban. Pertama pertanggungjawaban vertikal kepada pusat, kedua pertanggungjawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas. Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas efektivitas dan

kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Herawaty, 2011). Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya, Cantika (2018).

Lingkup pemerintahan daerah anggaran menjadi relevan dan penting, hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintahan. Menurut Ridwan dan Putra (2016) anggaran merupakan sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar menejer dapat melaksakan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien. Sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan kegiatan yang terdiri dari sejumlah terget yang akan dicapai oleh manajer departemen suatu perusahaan dalam melaksakan serangkaian kegiatan tertentu pada masa yang akan datang. Disamping itu perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pengembangan system perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya underfinancing atau overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran (Iskandar dkk, 2013).

Paramitha dan Gayatri (2016) mengemukakan sistem pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktifitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja menejer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah tetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk

memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggung jawaban. Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggung jawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpanan terhadap anggaran (Arifin W, 2017).

Menurut Andini dan Yusrawati (2015) transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntasi pemerintahan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan adalah refleksi atau bagaian dari kinerja organisasi publik.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Salah satu upaya konkret mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah kinerja pemerintah yang memenuhi karakteristik. Mandel (1997) menungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan

sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan. Akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan cara melakukan pelaporan kinerja melalui laporan keuangan. Fontanella dan Rossieta (2014) evaluasi penyelenggaraan pemerintah (tata kelola) merupakan proses pengawasan secara berkelanjutan dan pelaporan capaian target. Evaluasi kinerja penting dilakukan karena dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik.

Di Indonesia, perkembangan pengukuran kinerja dimulai dengan pemberlakuan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dalam perkembangannya muncul juga kinerja lain berupa LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) perkembangan kinerja ini memberikan peluang kepada daerah untuk membuktikan diri sebagai daerah terbaik di Indonesia (Purbasari dan Bawono, 2017). Mudhofar dan Tahar (2016) kinerja Pemerintah daerah mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari penurunan jumlah Pemerintah daerah yang tidak melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD) dan peningkatan indeks kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintah di Indonesia mengalami perbaikan. Adanya beberapa pemerintahan di berbagai negara justru melakukan tindakan korupsi paska implementasi desentralisasi fiskal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan praktikal (practical gap) atau anomali dari tujuan diberlakukannya otonomi pemerintahan.

Keberhasilan suatu program maupun kebijakan harus dijalankan sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Setidaknya terdapat syarat untuk menentukan keberhasilan dari kerja pemerintah, diantaranya akuntabilitas, transparasi, dan

partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability dan stewardship). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah kota Makassar untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah atau melakukan evaluasi terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah kota Makassar berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Namun dari hasil kinerja kota Banda Aceh untuk tahun 2018 dan 2019 sangat lemah, hal tersebut dapat dilihat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). LAKIP merupakan produk akhir SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. Kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota dari Provinsi Aceh memperoleh nilai sakib untuk tahun 2018 yaitu 55,02 prediket CC dan tahun 2019 dengan nilai 56,17 prediket CC, Hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat akuntabilitas perangkat daerah yang bersangkutan terhadap kinerja berada pada posisi “kurang” dalam artian system dan tatanan kerja kurang dapat diandalkan, manajemen kerja perlu banyak

perbaikan mendasar, masih rendah. Walaupun kota Banda Aceh laporan keuangan pemerintah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum tentu kinerja akuntabilitas pemerintah Kota Banda Aceh juga bagus. Hal ini menjelaskan bahwa kota Banda Aceh perlu membenah dan melakukan agar akuntabilitas kinerja mengikuti dengan laporan keuangan pemerintah kota Banda aceh yang sudah 11 kali mendapatkan WTP. (BPKA tahun 2020).

Penelitian mengenai Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Fenomena akhir-akhir ini, terdapat banyak penyimpangan yang berkaitan dengan anggaran dan sistem pelaporan di suatu instansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah dan sistem pelaporan yang kurang efektif kerap terjadi dan muncul kepermukaan sehingga masyarakat seringkali mempertanyakan kinerja pemimpin daerah. Berbagai kasus terkuak ke publik dan terjadi di kota-kota besar yang mengindikasikan kota-kota lainnya berpotensi pula terjadi penyimpanan.

Permasalahan yang ada pada kinerja pemerintah tersebut dapat mengacu pada kompetensi masing-masing individu agar dalam penyusunan laporan keuangan dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintahan tersebut. Kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah ditentukan pula oleh seberapa besar rasa tanggungjawab (akuntabilitas) yang dimiliki pegawai pemerintahan dalam mengerjakan laporan keuangan.

Berdasarkan rangkaian masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh perencanaan anggaran dan system pelaporan Terhadap Akuntabilitas kinerja Pada Pemerintah Kota Banda Aceh”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan anggaran dan system pelaporan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Apakah system pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Banda Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan anggaran dan system pelaporan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui system pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini, pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan perencanaan anggaran

dan system pelaporan semakin luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai perencanaan anggaran dan system pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Banda Aceh.

1.5 Skop Penelitian

Penelitian ini mengambil skop bidang ilmu akuntansi dengan konsentrasi berfokus pada akuntansi sektor publik, dengan analisis menggunakan metode analisis kuantitatif. Dengan skop penelitian terfokus pada akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Banda Aceh, yang lebih menitik beratkan pada perencanaan anggaran dan system pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Banda Aceh yang beralamat Jalan. Tgk. Abu Lam U No.7, Banda Aceh 23242.

manapun serta kepercayaan publik meningkat terhadap pemerintah daerah.

1. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, diharapkan agar menjawab kuesioner sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, agar peneliti dan pembaca mengetahui keadaan yang sebenarnya sehingga peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian sesuai kondisi yang terjadi di Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar memperluas objek penelitian tidak hanya pada Pemerintah Kota Banda Aceh, melainkan dapat dilakukan pada sektor swasta seperti perusahaan. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja..

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Halim & Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arifin, W. Beny 2012. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi & Investasi*. 13(1): 15-27.
- Asrida. 2012. Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kebangsaan*. 1(1):1-12.
- Auditya, L. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal. Universitas Bengkulu*. 3(1): 21-4
- Bastian, Indra. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga . Jakarta: Erlangga
- Darwanis dan Sephi Chairunnisa. 2013. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. 6(2): 150-174.
- Erryana, V dan setyawan. 2016. Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. 5(1): 1-4
- Faishol, A. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal penelitian ekonomi dan akuntansi*. 1(3): 1-8.
- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta:Rineka Cipta
- Fottanella, A dan Rossieta, H. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Terhadap Akuntabilitass Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. 1(1): 1-24
- Ghozali, Imam. (2013). *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS Versi 5.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. (2010). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Herawaty, Netty. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. 13(2): 31-36.
- Hidayat, Taufik. 2015. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi dan Locus Of Control terhadap Kinerja Manajerial. *Akuntabilitas*. 8(2): 148-161.
- Hidayattullah, Afilu dan Irene Herdjiono. 2015. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers Unisbank*: 1-12.
- Indrayani, Luh Febri., Putu Gede Diatmika., dan Made Arie Wahyuni. 2017. Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Publik (Studi Empirid pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar). *Jurnal Akuntansi Program S1*. 8(2): 1-13.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo.(2013) *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM
- Kusuma, M. (2012.) Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Cahaya Aktiva*. 2(2): 45-57
- Kaltsum, Ummu dan Abdul Rohman. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga). *Diponegoro Journal Of Accounting*. 1(1): 1-14
- Lasso,A,B dan Ngumar, S. (2016.) Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja kayawan bagian produksi PT. Brother Silver. *Jurnal ilmiah dan riset akuntansi*. 5(11): 1-15
- Muda, T.D.2015. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan. *Jurnal Akuntansi*. 4(1): 1-22.
- Mardiasmo. (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Malhotra, Naresh K.(2010). *Riset Pemasaran (Marketing Research)* (Edisi 4 Jilid 1).New Jersey,Indonesia: PT. Indeks

- Mahmudi, (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mimba, N, S, H. 2007. Public Sector Performance Measurement In Developing Countries. *Journal of accounting and organizational chang*. 3(3): 192-198
- Morissan, (2012), *Metode Penelitian Survey*, PT. Kencana, Jakarta
- Moheriono. (2012). “*Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mulyani, Sri dan Firdaus A. Rahman. 2012. Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Tekanan Anggaran, Komitmen Organisasi dan Kompleksitas Tugas Terhadap Slack Anggaran Pada Perbankandi Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I* 18(1): 43-62.
- Muraiya & Nadirsyah. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi Dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 3, No. 2, Halaman 236-253.
- Nazir, Moh (2010), *Desain penelitian*, Cetakan ke dua, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Nurrizkiana, B., Lilik, H., Widiastity, E. (2017.) Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah dan Implikasinya Terhadap Keperwayaan Public- Stakeholder. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. 18(1): 28-47
- Notoatmojo, Soekidjo. (2013). Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia
- Noerdiawan, Deddi. (2010). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
- Paramitha, Ida Ayu Made Dwiki dan Gayatri. 2016. Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 16(3): 2457-2479.
- Purbasari, H dan Bawono, A, D, B.2017. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. *Jurnal akuntansi*. 1(1):1-7
- Putra, G. (2017.) Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *Jom Fekon*. 4(1): 1-15.

- Rachmawati, Ike Kusdiyah. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Ristanti, N, M, A., Ni, K S dan Edy, S. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan). *E-Journal*. 2(1):1-11
- Riswanto, N. 2016. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. 1(1):1-7.
- Riyanti, F. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Penerapan System Pengendalian Pemerintah Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal keuangan..* 1(1): 1-13
- Robbins, Stephen P., (2016), *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1 dan 2* Dialihbahasakan Oleh Sugiono , Prenhallindo, Jakarta
- Rubin, Irene S .(2014). *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending* Washington DC: CQ Press.
- R. Terry, George dan Leslie, W. Rue, (2010), Dasar – Dasar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta
- Saputra, D, S., Darwanis dan Abdullah, S. 2014. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan perangkat Kerja Daerah. *Jurnal akuantansi*. 3(2):1-10
- Septiningtyas, T. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Dan System Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal akuantansi*. 1(1): 1-24
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance, Kepemerintahan yang Baik, Bagian Kedua* Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta
- Sekaran, Uma & Bougie, Roger. (2010). *Research Method For Business A Skill Building Approach (5th Edition)* United Kingdom : John Wiley & Sons Ltd.
- Simanjuntak. (2010). *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sigilipu, Steffi. (2013). Pengaruh Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen Dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal EMBA* Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 239-247

Susanto, azhar. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi Konsep dan Pengembangan Berbasis Komputer*. Penerbit: Lingga Jaya, Bandung.

Sugiyono, (2011), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Alfabeta, Bandung

Sugiyono, (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Alfabeta, Bandung

Yang, M, R, P dan Suartana, I, W. 2017. Pengaruh Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kinerja Pemerintah Daerah. *E-journal akuntansi*. 21(2):1-27.

Zoelisty.C dan Adityawarman. (2014). Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal Pada Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Di Lingkungan Universitas Diponegoro). *Diponegoro Journal Of Accounting*. 3(3):1-16.

